

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Pengembangan usaha agribisnis menjadi pilihan yang sangat strategis dan penting sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar minyak dan gas. Agribisnis menurut Soekartawi (2010) adalah usaha dalam bidang pertanian, baik mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran dan kegiatan lain yang berkaitan.

Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 melalui gerakan “Revolusi Hijau” yaitu gerakan untuk meningkatkan produksi pangan melalui usaha pengembangan teknologi pertanian. Penerapan program Revolusi Hijau di Indonesia sejak tahun enam puluhan melalui Program Panca Usaha Pertanian (PUP) yang meliputi pendirian beberapa pabrik pupuk kimia, memproduksi alat pengolah pertanian, serta pendirian industri pestisida. Keberhasilan Gerakan Revolusi Hijau merupakan bukti upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberhasilan pembangunan pertanian selama ini telah memberikan dukungan yang sangat tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, namun demikian tanpa disadari bahwa dibalik keberhasilan tersebut terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Produksi yang tinggi yang telah dicapai banyak didukung oleh teknologi yang memerlukan input (masukan) bahan-bahan anorganik yang tinggi terutama bahan kimia pertanian seperti pupuk

urea, TSP/SP-36, KCl, pestisida, herbisida, dan produk-produk kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan dengan dosis yang tinggi secara terus-menerus tersebut, terbukti menimbulkan banyak pencemaran yang dapat menyumbang kerusakan fungsi lingkungan dan sumberdaya alam, serta penurunan daya dukung lingkungan.

Gerakan Revolusi Hijau sebagai paket teknologi pertanian modern dengan jalan penggunaan varietas unggul berproduksi tinggi, penggunaan pestisida kimia, penggunaan pupuk kimia atau sintetis, dan penggunaan mesin-mesin pertanian untuk mengolah tanah dan memanen hasil sebagai upaya untuk peningkatan produksi pertanian tidak dapat berlangsung lama karena pendekatan teknologi dalam Revolusi Hijau tidak diimbangi dengan faktor kelestarian sumber daya dan lingkungan (Aeni, 2006). Menurut Soekartawi (2010) ada 4 hal yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, yaitu: 1) meningkatkan produktivitas pertanian (*productivity*); 2) meningkatkan kestabilan produktivitas (*stability*); 3) mempertahankan aspek kesinambungan (*sustainability*); serta 4) mempertahankan dan meningkatkan pemerataan (*equitability*).

Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan untuk memacu hasil pertanian dapat menyebabkan terjadinya kelelahan pada tanah dan penurunan produktivitas pada hampir semua jenis tanaman yang diusahakan tersebut. Hasil tanaman tidak menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun telah digunakan varietas unggul dengan pengolahan yang intensif. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia disamping menyebabkan kelelahan pada tanah juga dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan keracunan pada manusia. Residu pestisida yang terdapat dalam bahan makanan mengendap dalam tubuh manusia serta akan menimbulkan berbagai macam penyakit terutama kanker.

Memasuki abad ke-21 masyarakat dunia mulai sadar bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian, banyak penyakit yang dikaitkan dengan residu pestisida di dalam tubuh manusia, antara lain penyakit kanker, kerusakan sistem saraf, dan gangguan kesadaran. Unsur kimia dan pestisida yang terkandung dalam makanan dapat menyebabkan

gangguan kesadaran seperti sulit mengeja, membaca, menulis, membedakan warna, dan kanker payudara pada wanita. Kasus keracunan pestisida di Indonesia mulai muncul tahun 1995, yaitu di Brebes, Jawa Tengah, dilaporkan bahwa beberapa buruh tani penyemprot hama bawang menderita kebutaan dan stroke sebagai akibat keterlibatan mereka setiap hari dengan pestisida kimia, sedangkan di Tanah Karo, Sumatera Utara, sekitar tahun 1985 banyak buruh tani yang menderita paru-paru sebagai akibat dari semprotan pestisida (Sriyanto, 2010).

Perhatian masyarakat dunia perlahan mulai bergeser ke arah pertanian yang berwawasan lingkungan karena masyarakat mulai sadar dampak yang ditimbulkan dari residu kimia tersebut akan merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Masyarakat sangat peduli terhadap alam dan kesehatan, banyak pakar berusaha mengembangkan pertanian alternatif yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan kesuburan tanah dengan cara meningkatkan kandungan bahan organik. Teknologi alternatif tersebut dikenal dengan “pertanian organik” ataupun “usaha tani organik”. Pengertian “pertanian organik” ataupun “usaha tani organik” tersebut pada dasarnya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu untuk melukiskan sistem pertanian yang bergantung pada produk-produk organik dan alami, serta tidak menggunakan bahan-bahan sintetis.

Masyarakat semakin bijaksana dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya hidup sehat dan slogan *Back to Nature* telah menjadi trend baru dan meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia nonalami, seperti pupuk, pestisida kimia sintetis, dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Gaya hidup sehat demikian telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*), dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*). Atribut-atribut tersebut melekat erat pada produk pertanian organik. Gaya hidup organik yang banyak diangkat media beberapa tahun belakangan ini membuat pertanian organik semakin menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga banyak bermunculan produk-produk pangan yang mengatasnamakan organik.

Pertanian Organik merupakan pertanian masa depan untuk menciptakan makanan yang sehat dan aman, dengan pendekatan biologis, mekanis, dan fisik dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis sejak dari produksi sampai siap konsumsi. Pertanian organik di Indonesia mulai berkembang sejak awal abad ke-21.

Penelitian dan pengembangan produk pertanian organik menyatakan bahwa pertanian organik merupakan pertanian yang menguntungkan, hal ini dapat terlihat dalam paparan di bawah ini. Pengalaman Petani Soeparno pada tahun 2010 dari Dukuh Siganduk, Desa Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, bahwa dengan cuaca tahun 2010 yang tidak menentu, akan menyebabkan produktivitas tanaman padi menurun, akan tetapi dengan mengusahakan sistem pertanian organik, maka tanaman padi menjadi lebih kuat, rendemen hasil beras lebih tinggi (68 kuintal beras per hektar dengan cuaca tidak menentu) sedangkan tanaman non organik hanya menghasilkan 63 kuintal beras per hektar (Purwati, 2010). Pengembangan pola tanam SRI (*System of Rice Intensification*) oleh R. Utju Suiatna yang telah dilakukan sejak tahun 1999 (Suiatna, 2010) pada tanaman padi telah menunjukkan hasil panen 6,8,10 bahkan 15 ton per hektar. Pola tanam padi SRI merupakan suatu metode dalam penanaman dan perawatan padi yang mengubah struktur tanaman padi yaitu kerapatan serta jumlah akar dan anakan dengan mengubah cara-cara dalam pengaturan padi, tanah tempat tanaman tersebut tumbuh, dan air yang diterima tanaman melalui irigasi sehingga tanaman padi dapat lebih produktif. Pola tanam padi SRI memerlukan: 1) lebih banyak anakan per tanaman, 2) lebih banyak anakan subur/malai, 3) lebih banyak bulir per malai, dan 4) bulir padi yang lebih besar dan padat, agar tanaman padi lebih produktif.

Pertanian organik tidak sepenuhnya didukung semua pihak, saat ini di samping ada pendapat yang mendukung terdapat sebagian pihak yang kurang mendukung pertanian organik. Pertanian organik dianggap kurang produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan akan menciptakan produk pangan dengan harga yang mahal (Kerr, 2008). Produk pertanian organik merupakan produk pertanian yang bersifat keruahan (*bulkiness*) dan juga menggunakan pupuk organik dengan

takaran yang banyak dengan demikian dapat menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam pemanfaatan limbah organik, misalnya limbah panen untuk pakan ternak dan lain lain. Pemahaman yang salah tentang pertanian organik yang dapat menjadi penghambat pertanian organik yaitu bahwa pertanian organik merupakan usaha pertanian yang: 1) membutuhkan biaya mahal, 2) memerlukan banyak tenaga kerja, 3) merupakan sistem pertanian tradisional, serta 4) menghasilkan produksi rendah. Agribisnis pertanian organik dianggap sebagai bisnis yang berisiko tinggi karena berkaitan dengan hukum alam yang pengendaliannya sangat sulit dibandingkan dengan bisnis nonpertanian (Sutanto, 2002^a).

Penerapan pertanian organik sampai saat ini masih menjadi dilema antara usaha meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan pupuk ataupun pestisida kimia (produk agrokimia) serta usaha melestarikan alam yang berusaha mengendalikan/membatasi produk agrokimia tersebut. Pertanian organik dengan biaya tinggi serta berdasarkan beberapa kekurangan pertanian organik sebagaimana tersebut di atas menyebabkan tidak semua pihak dapat memberikan dukungan pada pertanian organik tersebut. Produk pertanian organik saat ini baru dapat dinikmati kalangan tertentu yaitu ekonomi kelas menengah ke atas, karena harganya lebih mahal dari produk pertanian konvensional. Penghambat pertanian organik lain yaitu berkaitan dengan kondisi kebutuhan pangan Indonesia yang masih melakukan impor pangan, sehingga perlu pemikiran yang lebih baik dalam menerapkan pertanian organik agar dapat menghasilkan produk pangan yang sehat, terjangkau, dan mencukupi kebutuhan pangan Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian secara khusus untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia. Program Pertanian “Go Organik 2010” yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian diharapkan dapat memacu pertanian organik di Indonesia. Pemerintah juga giat memberikan bimbingan teknis untuk mempercepat sertifikasi produk organik melalui Direktorat Mutu dan Standardisasi, Kementerian Pertanian. Kegiatan Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu dan Sertifikasi Pertanian Organik telah dijadwalkan pada tahun 2012 untuk 58 operator/kelompok tani/gabungan kelompok tani di seluruh Indonesia.

Dukungan Pemerintah Indonesia dalam pertanian organik selain tersebut di atas dapat terlihat juga dari semakin meningkatnya pemberian subsidi pupuk organik bagi para petani di Indonesia terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2008 - 2011

Tahun	Subsidi Pupuk Organik (ton)	
	Rencana	Realisasi
2008	345.000	68.400
2009	450.000	236.451
2010	750.000	246.130
2011	703.986	388.157

Sumber: Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, 2012

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian telah memberikan subsidi pupuk organik kepada petani Indonesia dan meskipun penyerapannya masih di bawah dari rencana akan tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, sehingga menunjukkan bahwa minat petani Indonesia pada pertanian organik semakin baik.

Pertanian organik secara khusus dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Organik merupakan istilah pelabelan yang menyatakan suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi. Produk pertanian dikatakan organik jika produk tersebut berasal dari sistem pertanian organik. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan dan konsumsi tidak terlepas dari masalah keamanan pangan dan pemanfaatan teknologi. Masalah keamanan pangan dapat terjadi pada sepanjang rantai penanganan produk pangan. Penjaminan keamanan pangan harus dimulai dari lahan sampai dengan pangan siap dikonsumsi. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan

merupakan hal yang penting bagi pelaku agribisnis. Peran produsen pangan terhadap keamanan pangan Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dalam Pasal 6 undang – undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib untuk: 1) memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia; 2) menyelenggarakan program pemantuan sanitasi secara berkala, dan 3) menyelenggarakan pengawasan atau pemenuhan persyaratan sanitasi.

Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan beras yang merupakan hasil dari komoditas padi sebagai makanan pokoknya. Sekitar 1.750 juta jiwa dari sekitar 3 miliar penduduk Asia, termasuk 200 juta jiwa penduduk Indonesia menggantungkan kalorinya dari beras.

Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2009 - 2011

Uraian	2009	2010	2011 (ARAM II)	Perkembangan			
				2009 - 2010		2010 - 2011	
				Absolut	%	Absolut	%
1. Luas Panen (ha)							
Jawa	6.093.603	6.358.521	6.519.771	264.918	4,35	161.250	2,54
Luar Jawa	6.789.973	6.894.929	7.046.827	104.956	1,55	151.898	2,20
Indonesia	12.883.576	13.253.450	13.566.598	369.874	2,87	313.148	2,36
2. Produktivitas (kw/ha)							
Jawa	57,24	57,21	56,49	-0,03	-0,05	-0,72	-1,26
Luar Jawa	43,47	43,65	44,32	0,18	0,41	0,67	1,53
Indonesia	49,99	50,15	50,17	0,16	0,32	0,02	0,04
3. Produksi (ton)							
Jawa	34.880.131	36.374.771	36.831.357	1.494.640	4,29	456.586	1,26
Luar Jawa	29.518.759	30.094.623	31.230.358	575.864	1,95	1.135.735	3,77
Indonesia	64.398.890	66.469.394	68.061.715	2.070.504	3,22	1.592.321	2,40

Data BPS, Juli 2011, (kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling/GKG)

Data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) per Juli 2011 sebagaimana terlihat pada Tabel 2 menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2011 diperkirakan sebesar 68,06 juta ton, meningkat sebanyak 1,59 juta ton (2,4 %) dari tahun 2010, sedangkan tahun 2010 sebesar 66,47 juta ton gabah kering giling (GKG) meningkat sebanyak 2,07 juta ton (3,22 %) dari tahun 2009. Kenaikan produksi padi tahun 2011 diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 313,15 ribu hektar (2,36 %) dan produktivitas sebesar 0,02 kuintal per hektar (0,04%).

Produktivitas dan luas panen padi di pulau Jawa berdasarkan Tabel 2 tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa lahan pertanian semakin sempit dan semakin tidak sehat karena telah banyak mengandung pestisida atau zat kimia, sehingga produk yang dihasilkan menjadi tidak sehat pula. Masalah penyempitan lahan pertanian serta produktivitas yang semakin menurun tersebut perlu segera diatasi agar lahan pertanian di Indonesia dapat terus menghasilkan komoditas pertanian terutama untuk pangan yang sehat dan berkualitas.

Pertanian organik merupakan solusi untuk mengembalikan kesehatan lahan dan produk yang dihasilkan. Keinginan masyarakat untuk beralih ke produk organik menyebabkan permintaan produk pertanian organik meningkat pesat. Produsen pertanian organik di Indonesia pada saat ini masih sangat terbatas, hal ini merupakan peluang bagi pelaku agribisnis Indonesia dalam mengembangkan produk pangan organik. Fenomena pangan organik tersebut perlu ditangkap sebagai peluang bagi pembangunan pertanian di Indonesia khususnya menyangkut produk pangan tropis, karena Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati tropika yang unik, kelimpahan sinar matahari, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang menghormati alam, sehingga pada dasarnya Indonesia mempunyai modal dasar yang luar biasa besarnya yang diperlukan untuk mengembangkan pertanian organik.

Pertanian organik telah berkembang cukup pesat di Indonesia, berdasarkan data Statistik Pertanian Organik Indonesia dari Aliansi Organik Indonesia tahun 2011 total luas area lahan pertanian organik di Indonesia pada 2010 seluas 238.872,24 hektar. Jumlah luasan lahan organik tersebut meningkat 10 % dari

tahun 2009. Penurunan luas area lahan pertanian organik di Indonesia terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,77 % sehingga lahan organik di Indonesia menjadi seluas 255.062,65 hektar. Penurunan lahan organik ini terjadi karena menurunnya luas area pertanian organik yang tersertifikasi.

Petani organik di Indonesia masih terbentur mekanisme pasar sebagai akibat dari regulasi yang belum berpihak pada mereka, akibatnya dalam proses penjualan produk-produk pertanian organik, petani sulit berkompetisi, bahkan ada kecenderungan produk yang ditawarkan tidak diterima pasar. Petani organik di Indonesia sulit menyalurkan produk-produk pertanian organiknya, karena tidak mengantongi sertifikat dari lembaga sertifikasi yang diakui Pemerintah, sehingga banyak ditolak pasar, meskipun ada juga yang menerima produk-produk organik tersebut. Biaya untuk mendapatkan sertifikat organik dari lembaga-lembaga sertifikasi yang diakui Pemerintah menurut petani dirasa sangat mahal (Aliansi Organik Indonesia, 2011).

PT Surya Ciptani Wangunharja sebagai salah satu perusahaan yang telah mendapat sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik di Indonesia merasa biaya sertifikasi organik di Indonesia tidak mahal (tahun pertama sebesar Rp 9.000.000,00 dan tahun selanjutnya Rp 7.000.000,00 di luar biaya internal) akan tetapi persyaratan yang disiapkan harus detail meliputi kelengkapan dokumen mulai dari sejarah lahan dari proses awal hingga pemanenan, bukti transaksi pembelian, bahan pendukung penanaman dan penjualan produk serta pihak yang terlibat dalam proses penanaman dan dilaporkan setiap tahun serta ada inspeksi dari lembaga sertifikasi organik tersebut terhadap dokumen, tanaman dan lahan (Yuliantina, 2010).

Keahlian dan keterampilan yang baik dari seorang agribisnis diperlukan sebagai upaya dalam pengelolaan pertanian organik agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global dan memenuhi standar mutu keamanan pangan organik. Sistem pangan organik di Indonesia berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik yang merupakan revisi dari SNI 01-6729-2002. SNI 6729:2010 menetapkan persyaratan sistem produksi pangan organik di lahan pertanian, penanganan,

penyimpanan, pengangkutan, pelabelan, pemasaran, sarana produksi, bahan tambahan, dan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan.

Gasol Pertanian Organik (GPO) adalah agribisnis pertanian pangan organik yang berlokasi di di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Agribisnis GPO merupakan usahatani atau agribisnis yang mengutamakan penanaman padi varietas lokal Cianjur yang sudah terkenal sebagai beras berkualitas. Pemilik Agribisnis GPO menyatakan bahwa budidaya di lahan dilakukan dengan cara organik, tanpa bahan kimia, misalnya untuk pupuk, pestisida, atau bahkan zat pengatur tumbuh sehingga hasilnya benar-benar alami.

Beras merah dan beras merah wangi beserta tepungnya merupakan produk unggulan dari Agribisnis GPO ini, dengan alasan sebagai berikut.

1. Beras merah merupakan salah satu produk pangan yang cocok untuk kesehatan karena mempunyai indeks glikemik (*Glycemic Index/GI*) yang lebih rendah ($GI = 55$) dibandingkan dengan beras putih ($GI = 70-87$).
Indeks Glikemik merupakan skala angka yang digunakan untuk menunjukkan seberapa cepat dan seberapa tinggi suatu makanan tertentu dapat meningkatkan kadar glukosa darah (Narto, 2011).
2. Agribisnis GPO berusaha melestarikan varietas lokal sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia antara lain varietas lokal Cianjur pada padi merah.
3. Beras merah dan tepung beras merah merupakan bahan pangan yang aman dan sehat sebagai Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).

Produk Agribisnis GPO dikemas dan dijual sebagai produk organik, akan tetapi sampai saat ini produk GPO belum mencantumkan sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik yang berkompeten di Indonesia. Sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan produk pangan yang telah dimiliki Produk GPO antara lain: 1) sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia; 2) hasil uji air dari Seameo Biotrop Service Laboratory Bogor; dan 3) sertifikat merek dagang dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.2. Perumusan Masalah

Produk pangan dari pertanian organik tidak bisa terlepas dari masalah keamanan pangan. Produk pangan organik mensyaratkan keamanan pangan yang utuh (*zero*) yang terbebas dari bahan kimia pada setiap proses produksinya dari lahan hingga sampai ke tangan konsumen. Standar Pangan Organik (SNI 6729:2010) telah ditetapkan sebagai upaya untuk menjaga mutu produk pangan organik di Indonesia. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip produksi pangan organik mulai dari penyiapan di lahan pertanian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan hingga pemasaran. Agribisnis GPO menyatakan produk yang dihasilkan berasal dari budidaya secara organik. Beras merah merupakan produk unggulan dari agribisnis GPO, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis hal-hal sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses produksi beras merah di Agribisnis GPO?
2. Bagaimanakah penerapan sistem pangan organik pada komoditas beras merah di Agribisnis GPO?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pangan organik pada komoditas beras merah di Agribisnis GPO dalam rangka memperoleh sertifikat organik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan/memaparkan proses produksi komoditas beras merah di Agribisnis GPO.
2. Menganalisis penerapan sistem pangan organik pada komoditas beras merah di Agribisnis GPO.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sistem pangan organik pada komoditas beras merah di Agribisnis GPO dalam kaitannya dengan sertifikasi organik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai informasi bagi petani dan pelaku agribisnis dalam memproduksi produk pangan organik agar sesuai dengan sistem pangan organik serta mengatasi hambatan-hambatan dalam proses sertifikasi organik.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah atau pihak yang terkait dengan sertifikasi pangan organik.
3. Sebagai dasar konsumen dalam memilih produk pangan organik.